

DAFTAR PUSTAKA

Buku- Buku :

- Amrusi, Fahmi. (2012). *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung: Nusamedia.
- Criekemas, David. (2008). *Are The Boundaries between Paradiplomacy and Diplomacy Watering Down?*. Anwerp: University of Anwerp and Flemish Centre.
- Fahri, Mufidah. (2018). *Dinamika Kerja sama Kota Bandung-Braunschweig dalam Kerangka Sister City*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Joseph, Stiglitz. (2003). *Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional*, Terj. Ahmad Lukman. Jakarta: PT Ina Publikatama.
- Kaho, Josep Riwu. (1996). *Mekanime Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Manan, Bagir. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.
- Muslimin, Amrah. (1982). *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Cipta Pustaka
- Ngadino. *Peranan Hukum Dalam Globalisasi Ekonomi*. Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.1 Januari –April 2014.
- Nugraha, G. Setya. (2010). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Penerbit Aprianto.
- Sinaga, Obsatar. (2010). *Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik: Implementasi Kerja sama Internasional*. Bandung: Lepsindo.

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sutami, Siti. (2005). *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Syafiie, Inu Kencana. (2010). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Refika Aditama.

Syafruddin, Ateng. (1991). *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II Dan Perkembangannya*. Jakarta: Penerbit Mandar Maju.

Wolf, Stefan. (2009). *Paradiplomacy: scope, opportunities and challenges*. Nottingham: University of Nottingham.

Yusdianto, Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015.

Regulasi :

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah Daerah Dengan
Pihak Luar Negeri

Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Panduan
Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah

Peraturan Walikota Makassar nomor 18 tahun 2019 tentang pedoman
kerja sama daerah.

Jurnal :

Gunawan Kusmantoro. 2016. Hubungan Dan Kerja sama Pemerintahan
Daerah Dengan Pihak Luar Negeri Fakultas Hukum Universitas
Singaperbangsa Karawang

Jawahir Thontowi. Kewenangan Daerah Dalam Melaksanakan Hubungan
Luar Negeri (Studi Kasus di Propinsi Jawa Barat dan DIY). Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Sumber Internet :

<https://hukumonline.com/> (diakses pada tanggal 16/06/2020).

<https://makassar.terkini.id/> -Pemkot Makassar-Pemerintah Gold Coast
Teken MoU Sister City, Berikut Bidang Kerja samanya. (diakses
pada tanggal 10/06/2020).

<https://makassarkota.bps.go.id/> -Makassar Dalam Angka 2018. (diakses
pada tanggal 23/11/2020)

<https://pengertiandefinisi.com/> (diakses pada tanggal 16/06/2020).

<https://fajar.co.id/2019/09/19/najiran-presentasikan-potensi-investasi-kota-makassar-di-australia/> (diakses pada tanggal 05/12/2020).

DOKUMENTASI



Danny Pomanto (Walikota Makassar eriode
2014-2019)



Abdul Wahab Tahir (Ketua Komisi A DPRD
Kota Makassar)



Mario David (Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar)



Erwin Kesuma, SE, MM (Kepala Sub Bagian Kerja sama Investasi dan Non Investasi Kota Makassar)



Najiran S, S.STP, M.Si, Ph.D (Kepala Sub Bagian Kerja sama Antar Daerah dan Lembaga Kota Makassar)